

Kepemimpinan Tradisional Masyarakat Minangkabau pada Masa Pendudukan Jepang

Oleh: Siti Fatimah

ABSTARCT

As an ethnic group Minangkabau people was influenced by many conditions developed around them, like scio-cultural, value system they had, beliefs and religious, and status and roles they played. Based on those conditions, Minangkabau people has been well-known with their unique community structure and leadership pattern in the past. This condition had been running in harmony until the coming of Japanese colonialism in 1943. This pattern of leadership had been changed and tended to be dysfunctional. In their colonialism era, Japanese tried to use the *Tungku Tigo Sajarangan* (the pattern of Minangkabau traditional leadership) as a tool for maintaining their power over Minangkabau colony.

Kata Kunci: *Kepemimpinan, pola dan sistem kepemimpinan, kepemimpinan tradisional, Minangkabau,*

I. PENDAHULUAN

Telaah tentang pola-pola dan sistem kepemimpinan adalah suatu hal yang menarik, karena konsep mengenai kepemimpinan seringkali sangat erat hubungannya dengan kondisi-kondisi politik, perubahan-perubahan sosial, pergeseran dinamika-dinamika lainnya yang berlaku di tengah-tengah suatu masyarakat. Di sisi lain pola-pola kepemimpinan yang berlangsung di tengah-tengah suatu masyarakat tertentu tidak pula terlepas dari berbagai faktor yang mendukung masyarakat itu sendiri, umpamanya kondisi sosial budaya, sistem nilai yang dimiliki, agama dan kepercayaan yang dianut, peranan dan status yang diembannya.

Minangkabau sebagai salah satu kelompok etnis tertentu, tidak terlepas dari persoalan di atas. Dengan kondisi

sosial budaya yang serba kompleks, suku minangkabau sudah dikenal mempunyai struktur masyarakat yang teratur pada masa lalu. Dalam berbagai sumber yang terdapat, baik tertulis maupun tidak, masyarakat minangkabau telah diperkenalkan dengan sistem pola kemasyarakatan/pemerintahan yang secara umum dikenal yaitu; *Bodhi Caniago* dan *Koto Piliang*. Di Minangkabau sering dikenal "orang yang dituakan", kalaulah istilah orang yang dituakan ini tidak identik, tetapi konsep ini biasa diberikan terhadap seseorang yang dianggap sebagai pemimpin, apakah itu dalam kelompok (*communal*) terkecil maupun kelompok yang lebih luas.

Dalam perkembangan sejarah Minangkabau, pola-pola kepemimpinan tradisional terlihat berjalan

dengan harmonis sampai dengan masuknya pengaruh-pengaruh luar atau kekuatan-kekuatan asing. Namun setelah dominasi kekuatan asing, pola kepemimpinan masyarakat tradisional menjadi rusak. Reaksi terhadap itu ditunjukkan oleh terjadinya berulang kali pergolakan sosial dan intelektual.¹

Anthoni Reid dalam bukunya "The Japanese and Rival Indonesian Elite: Sumatera 1942-1949"² menjelaskan bahwa inovasi yang sungguh luar biasa dari pemerintahan Jepang adalah diajaknya semua sumber-sumber kepemimpinan yang ada untuk masuk ke dalam berbagai badan administratif, penasehat, propaganda, tempat mereka sedikit banyaknya harus bekerjasama. Bertitik tolak dari pendapat Reid dapat diduga bahwa Jepang yang dikenal dengan promosi 3A (Jepang cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia dan Jepang Pelindung Asia) ternyata tidak jauh berbeda dengan pendatang sebelumnya dalam pelaksanaan politik kolonialnya. Hanya yang menjadi persoalan adalah apakah dalam penerapannya model-model yang diterapkan Jepang berbeda dengan sebelumnya? Bila

berbeda, dalam segi-segi apakah ia berbeda dan bagaimanakah perbedaan tersebut khusus terhadap sistem kepemimpinan tradisional yang berlaku di Minangkabau?

Masalah utama adalah menyangkut sekitar sistem kepemimpinan tradisional masyarakat Minangkabau. Karena begitu luasnya persoalan ini, maka penulis membatasinya sekitar pada periode Jepang (1942-1945). Dalam hal ini ditekankan pada persoalan sejauh mana pengaruh Jepang menimbulkan perubahan-perubahan terhadap kepemimpinan tradisional masyarakat Minangkabau pada masa itu. Bagaimanapun juga, tulisan ini bertujuan untuk: (1) memahami secara lebih jelas bagaimana persisnya pola-pola kepemimpinan tradisional masyarakat Minangkabau sebagai suatu proses sejarah pada tingkat mikro; (2) mengungkapkan pengaruh Jepang terhadap pergeseran-pergeseran pola kepemimpinan masyarakat Minangkabau; dan (3) membandingkan pola kepemimpinan tradisional masyarakat Minangkabau pada masa Jepang dengan periode sebelumnya.

II. BEBERAPA KONSEPSI TENTANG TEORI KEPEMIMPINAN

Guna memperjelas konsep "Kepemimpinan Tradisional" maka dicoba meminjam tipologi Weber mengenai konsepsi kepemimpinan itu sendiri. Menurut Weber ada tiga tipe kepemimpinan umat manusia: tradisional, rasional-legal, dan kharismatik³. Tipologi Weber ini dilihat

¹ Taufik Abdullah. 1972. *Modernization in the Minangkabau World; West Sumatera In Early of the twentieth Century*. London, Ithaca, London: Cornell University Press; Taufik Abdullah. 1972. *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatera*. New York: Ithaca Cornell University Press; Taufik Abdullah. 1966. "Adat and Islam An examination of conflict in Minangkabau" dalam *Indonesia*, No. 2 Oktober 1966; Schrieke. 1973. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi* (terjemahan oleh: Soergata Poerbakawatja. Jakarta: Bharata.

² Dalam Schrieke. 1973. *Ibid*.

³ Max Weber. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization* (translated by A.M

berdasarkan bentuk-bentuk aksi sosial dan dengan hubungan-hubungan sosial yang menjadi ciri khas berbagai masyarakat tertentu.

Kepemimpinan tradisional menurut Weber adalah orde sosial yang bersandar kepada kebiasaan-kebiasaan kuno dengan mana status dan hak-hak pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan⁴. Kepemimpinan tradisional juga memerlukan unsur-unsur kesetiaan pribadi yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Berbeda dengan tipe rasional-legal dimana semua peraturan tertulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas, maka batas wewenang para pejabat ditentukan oleh aturan main; kepatuhan dan kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi para pejabat melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal.. Sedangkan analisis Weber tentang kepemimpinan 'karismatik' adalah seorang pemimpin atau raja yang mempunyai sifat keramat.⁵

Adakalanya sulit memberikan batasan yang tegas antara tipe tradisional dengan karismatik, karena dalam realitasnya tidak jarang seorang pemimpin yang memiliki tipologi tradisional, sekaligus mengemban tipe karismatik. Untuk ini dapat ditemukan dalam beberapa kasus di Jawa dan Minangkabau.⁶

Henderson and Talcott Parsons). New York: Oxford University Press.

⁴ April Carter. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali.

⁵ Koentjaraningrat. 1986. "Kepemimpinan dan Kekuasaan Tradisional, Masa Kini, resmi dan Tak Resmi" dalam Miriam Budiarmo. *Aneka Penulisan tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.

⁶ Herman Sihombing. 1983. "Hukum Adat Minangkabau mengenai Tungku Tigo

Pada masyarakat Minangkabau bentuk kepemimpinan tradisional dapat dilihat dalam institusi-institusi adat yang ada. Berbeda dengan di Jawa, di Minangkabau pemimpin tertinggi tidak terletak di tangan raja melainkan di tangan penghulu, sekalipun di daerah Minangkabau pernah terdapat suatu kerajaan di masa lalu. Kepemimpinan tradisional ini adalah berdasarkan stelsel martilial menurut tingkatannya masing-masing. Pada umumnya pemimpin rumah tangga disebut *tungganai*, pemimpin kaum disebut *mamak kaum*, pemimpin suku adalah *penghulu*.⁷

Di sisi lain, dalam konsepsi kepemimpinan Minangkabau dikenal apa yang disebut dengan *Tungku Tigo Sajaringan*, yang erat kaitannya dengan pengelompokan sistem kepemimpinan masyarakat Minangkabau, yaitu kepemimpinan ninik mamak, kepemimpinan alim ulama, dan kepemimpinan cerdik pandai.⁸

III. STRUKTUR KEPEMIMPINAN TRADISIONAL MASYARAKAT MINANGKABAU

Struktur sosial Minangkabau tradisional dapat dibagi dalam dua sistem

Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin" dalam A.A. Navis (Ed). 1983. *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial*. Padang:Genta Singgalang Press.

⁷ Di Jawa umpamanya kepemimpinan sunan-sunan, di mana mereka bertipe tradisional sekaligus juga bertipe kharismatik, di Minangkabau bisa terdapat pada kepemimpinan Penghulu dan kepemimpinan para ulama seperti *sech-sech* di Sumatera Barat. Untuk lebih jelasnya, baca Sartono Kartodirdjo. 1984. *Ratu Adil* Jakarta: Sinar Harapan.

⁸ A.A Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.

yang berbeda, yaitu: *The Royal Family System* (Sistem keluarga penguasa kerajaan/bangsawan) dan *The Commoners* (rakyat biasa). Bentuk pertama adalah sistem patrilineal yang tak dapat dipisahkan dari alam Minangkabau. Ini juga dapat dianggap sebagai perwakilan dari *The male principle*. Sedangkan yang kedua dapat dikatakan mewakili model sistem matrilineal (*the female principle*). Namun kedua bentuk ini disatukan ke dalam *a sacral marriage*.⁹

Berdasarkan bukti-bukti sejarah setelah abad ke-16, setelah pemerintahan Adityawarman, terdapat tiga raja di Minangkabau, yaitu *raja Alam*, *raja Ibadat*, dan *Raja Adat*. Ketiga raja tersebut disebut *Rajo Tigo Selo*. Yosselin De Jong menyebutkan raja adat adalah simbol kewanitaan, oleh karena itu kadang-kadang disebut dengan *Tuan Gadis*.¹⁰ Raja ini boleh laki-laki dengan syarat harus memanjangkan rambutnya. Sedangkan raja ibadat adalah simbol kaum laki-laki. Keduanya disebut *Rajo Duo Selo*. Namun kekuasaan raja tidak pernah berfungsi sebagai kepala pemerintahan di Minangkabau.

Wilayah ini terdiri dari Dua laras dan Tiga Luhak. Luhak itu sendiri wilayahnya amorfik dan bukan merupakan unit politik dalam pengertian tradisional. Organisasi sosial politik tertinggi sebelum masuknya pengaruh asing adalah Nagari yang terdiri dari beberapa kampung yang saling berdekatan nagari biasanya diperintah oleh

sebuah lembaga kampung yang biasanya adalah Primus Inter pares. Tidak terdapat kaitan struktur secara formal antara nagari dengan nagari lainnya¹¹. Oleh karena itu setiap nagari berdiri sendiri di mana nagari satu terlepas dari nagari yang lainnya¹². Dengan demikian orang sering menyebutnya dengan republik Nagari.

Kampung biasanya dikepalai oleh kepala kampung. Disamping itu juga terdapat kepala dari masing-masing suku. Biasanya ada beberapa buah suku yang termasuk ke dalam sebuah kampung. Kepala suku yang tertua di antara kepala suku yang ada dalam kampung yang bersangkutan dipilih untuk menjadi kepala kampung, mereka dimuliakan dengan istilah Datuk yang dipusakai¹³.

Pada mulanya terdapat empat suku pokok di Minangkabau yang terdapat dari dua kelurahan. Suku Koto dan Suku Piliang termasuk kelurahan Koto Piliang. Sedangkan Suku Bodhi dan Caniago termasuk kelurahan Bhodi Caniago.

Dewasa ini menurut L.C. Westenenk telah berkembang cabang-cabang suku, lebih kurang 96 suku yang menyebar di seluruh nagari di Minangkabau¹⁴.

⁹ Taufik Abdullah. 1966. "Adat dan Islam: An Examination of Conflict in Minangkabau" dalam *Indonesia*, No 2 Oktober 1966.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Masalah antara satu nagari dan nagari lainnya sering terjadi perkelahian. P.E. de Josselin de Jong. 1980. *Minangkabau and Negeri Sembilan: Sosio Political Structure in Indonesia*. Den Haag: Martinus Nijhoff Iletgeverij.

¹² Ahmad Dt. Batuah A. Dt. Madjoindo. Tanpa Tahun. *Tambo Alam Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka.

¹³ Mochtar Naim. 1984. *Merantau Pola Migrasi Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah-mada University Press.

¹⁴ P.E de Josselin de Jong. 1980. *Op cit.*

Suku atau *matriclan* adalah unit utama dari struktur sosial masyarakat Minangkabau, dan seseorang tidak dapat dipandang sebagai orang Minangkabau kalau tidak mempunyai suku. Tiap suku biasanya terdiri dari beberapa *parui*. *Parui* dapat dibagi ke dalam Jurai, dan jurai terbagi kedalam Samande¹⁵. Cara pembagian suku seperti demikian adalah ke dalam berbagai tingkat jenis keturunan (*lineage*), namun dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai mana yang dikatakan de Jong, Jurai adalah istilah yang kabur yang mungkin menunjukkan persamaan *consanguinealitas* saja atau pertalian kelompok di bawah atau di atas tingkatan *parui*. Sebaliknya *samande* sukar dipandang sebagai unit yang berdiri sendiri oleh karena dua atau tiga *samande* bisa sama mendiami rumah yang satu.

Sebuah nagari biasanya dapat berisikan empat sampai sepuluh suku. Bahkan lebih, di padang tahun 1933 terdapat delapan sampai seppuluh suku di Koto Tangah¹⁶. Jadi suku bukanlah merupakan unit teritorial,. Oleh karena itu kesatuan teritorial yang merupakan daerah otonom adalah nagari. Terdapat beberapa tingkat bentuk Unit teritorial, dari rumah adat, berikut taratak, dusun, koto, sampai pada nagari sebagai puncaknya. Setiap nagari memiliki sebuah balai adat, masjid, jalan-jalan raya atau setapak, pandan pakuburan, medan laga, tepian mandi, lapangan

olahraga dan tempat hiburan¹⁷. Bahkan nagari seharusnya juga memiliki sawah, perkebunan dengan berbagai jenis tumbuhan yang ada di dalamnya.¹⁸

Pada masa pemerintahan Belanda terdapat istilah *laras*. *Laras* dibentuk bila nagari mempunyai adat yang sama dalam bentuk federasi (gabungan) yang sering diistilahkan dengan koto, seperti sebutan IV koto, VI koto, XIII koto dan seterusnya. Pada masa kedatangan Belanda tahun 1937 di Tanah Datar terdapat empat belas kelurahan dan di Agam dua belas kelurahan.¹⁹ di dalam sukunya penghulu paling berkuasa. Adakalanya penghulu bersama penghulu lainnya mengadakan rapat di balai adat nagari bila ada masalah-masalah dalam penduduk nagari. Sedangkan penghulu pada dasarnya tidak bekerja sendiri: dia dibantu oleh penghulu kecil.²⁰ di daerah lain adakalanya terdapat istilah atau sebutan yang berbeda untuk tujuan dan maksud yang sama.

Kadang-kadang terdapat perbedaan penamaan yang menolak untuk maksud yang sama di beberapa daerah. Di Bukittinggi masing-masing keluarga atau *parui* dikepalai oleh penghulu Andiko. Di Payakumbuh kepala *parui* juga disebut penghulu Andiko. Di Suliki disebut penghulu nan VI suku, tapi penghulu Andiko tetap kepala *parui*. Sedangkan menurut informasi Ronket dan

¹⁵Mochtar Naim. 1984. *Opcit.*; Lilat juga Josselin de Jong. 1980. *Op cit.*

¹⁶Chistine Dobbin. 1975. *The Exercise of Authority in Minangkabau in Late Century*. Kuala Lumpur.

¹⁷ Bahasan tentang Nagari pada awal abad ke -20, lihat L.C. Westenenk. 1918. *De Minangkabau Sche Nagari* Edisi ke-3. Welstervreder.

¹⁸ S. Raffles (ed). "Memoir of the Live and Public Service of Sir Thomas Stamford" dalam, Cibidristine Dobbin. 1975. *Op cit.*

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid.*

Puncak, sedangkan orang yang terkemuka mengepalai nagari disebut pucuk, di rantau pucuk sering disebut raja.²¹ Data memperlihatkan kelompok geneologis dibentuk oleh nagari. Setiap nagari berbentuk republik kecil, begitu juga di rantau, kecuali Indragiri disebut berbeda.

Unsur-unsur Koto Piliang dan Bodhi Caniago mungkin ditemukan dalam nagari yang sama. Sekalipun nagari tersebut terdapat suku yang berlainan. Akan tetapi biasanya ditandai dengan suku yang dominan. Oleh karena itu orang biasanya ditandai mengatakan bahwa Luhak Agam lebih didominasi oleh Bodhi Caniago, Luhak Lima Puluh Koto oleh Koto Piliang dan Tanah datar campuran di antara keduanya.²² Sedangkan keluarga kerajaan lebih didominasi oleh Koto Piliang.²³

Luhak Tanah Datar yang merupakan gabungan antara adat Koto Piliang dengan Bodho Caniago, tiga daerahnya yang terpenting adalah Solok, Singkarak dan Batu Sangkar. Di Solok keluarga disebut sesuku yang dikepalai oleh penghulu Andiko. Bila suku atau keluarga menempati beberapa rumah, maka penghulu Andiko mengepalai beberapa mamak, sedangkan nagari dikepalai oleh penghulu pucuk. Tetapi ia adalah seorang penghulu Andiko yang dianggap Primus Interpres.²⁴ Di

Singkarak sama dengan di Solok yang berbeda hanya keluarga tidak disebut suku tetapi kampuang.

IV. STRUKTUR KEPEMIMPINAN TRADISIONAL MASYARAKAT MINANGKABAU

Pada tanggal 14 Maret 1942 Belanda meninggalkan Batavia. Keesokan harinya penduduk kota menerima pengumuman yang dikeluarkan bersama oleh Residen Mr.C.W.A. Abbenunis dan wali kota Ir. E.A. Voorneman.²⁵ Pada hari itu juga 5 Maret 1942. ibu kota Hindia Belanda jatuh ke tangan tentara Jepang. Wilayah Hindia Belanda yang pertama-tama jatuh ke tangan Jepang adalah kepulauan Tambelan di Laut Cina Selatan yang diduduki Jepang pada tanggal 27 Desember 1941. Tak lama kemudian mendarat di Taratak (Kalimantan Timur) dan Manado (Sulawesi Utara). Balikpapan diduduki tanggal 24 Januari, Ambon tanggal 2 Februari, Palembang pada tanggal 15 Februari bersama dengan jatuhnya Singapura, dan demikian juga daerah-daerah sumber minyak di daerah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan sudah berada di bawah tangan Jepang. Timor diduduki tanggal 20 Februari. Pendaratan di Sumatera Utara dan Timur tanggal 12 Maret dan pada tanggal 17 Maret Kota Padang jatuh ke tangan Jepang.

Berdasarkan kenyataan itu, jelaslah bahwa intensitas pendudukan Jepang di seluruh Nusantara dirasakan

²¹P.E. de Josselin de Jong. 1980. *Op cit.*

²²Elizabeth E. Graves. 1981. *The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the Nineteenth Century*. New York: Ithaca: Cornell University Press.

²³Christine Dobbin. 1977. "Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise of Padri", dalam *Indonesia*. 1977.

²⁴P. E. de Josselin de Jong. 1980. *Op cit.*

²⁵Arsip nasional Republik Indonesia, di bawah pendudukan Jepang: kenangan Empat puluh dua orang yang mengalaminya, penerbit Sejarah Lisan No.4.1988.

berbeda-beda, demikian pula penetrasi kekuasaan dan kebudayaan Jepang tidak merata. Daerah yang masuk front pertempuran lebih menderita dibanding dengan daerah yang tidak masuk. Sementara itu pemerintahan penduduk (Jepang) lebih banyak mendapat kesempatan untuk melaksanakan *policy* (kebijaksanaan) penduduk sesuai dengan rencananya.

Wilayah yang diduduki Jepang dibagi dalam dua bagian besar. Pulau Sumatera dan Jawa berada di bawah kekuasaan militer Angkatan Darat (Rikugun), dan Kalimantan serta wilayah yang dahulu dikenal sebagai daerah Timur Besar dikuasai oleh pemerintahan militer Angkatan Laut (Kaigun). Dalam pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah, penguasa militer berperang kepada tiga prinsip utama, yaitu 1) Mengusahakan agar dapat dukungan rakyat untuk memenangkan perang; 2) Memanfaatkan sebanyak mungkin struktur pemerintahan yang telah ada; 3) meletakkan dasar agar wilayah yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Laskar rakyat Sumatera atau *Giyugun* Sumatera adalah semacam tentara yang direkrut Jepang dari kalangan Pemuda Indonesia pada tahun kedua setelah pendudukan Jepang. Di Jawa mereka lebih dikenal dengan PETA (Pembela Tanah Air). Keduanya dibentuk atas kebijaksanaan pemerintah yang berkedudukan di Dallat (Vietnam). Setelah PETA di Jawa diresmikan, Gunseibu Sumatera yang berkedudukan di Bukittinggi baru mengeluarkan pengumuman tentang *Giyugun*. Pelaksanaan pembentukan pun sama sekali tidak serentak untuk seluruh

Sumatera. Di Sumatera Barat pendaftaran tahap pertama dimulai pada bulan November 1943, kemudian diikuti oleh Aceh, lalu Sumatera Timur dan seterusnya baru keresidenan atau *Shu* lainnya. Akan tetapi sebelum *Giyugun* dibentuk di Sumatera Barat, sudah dibentuk "Membangun Gerakan Rakyat" Juli 1943 dipimpin oleh Muhammad Syafe'i dan Chatib Sulaiman.²⁶ Gerakan ini cukup berpengaruh, karena rakyat telah memberikan tanggapan yang positif tentang *Giyugun* Sumatera sebelum Sumatera Gunseikanbu mengumumkan secara resmi.²⁷

Antara pejabat militer Jepang yang berkedudukan di Jawa dengan mereka yang berkedudukan di Sumatera hanya ada kontak yang terbatas. Masing-masing pusat pemerintahan lebih banyak menjalankan tugas sendiri-sendiri.

Namun demikian, tetap ada kemiripan pengaturan seperti cara-cara mobilisasi calon-calon pemuda untuk menjadi militer. Jika di Jawa Jepang mengadakan pendekatan melalui kantor Shumubu (Kantor Urusan Agama), maka di Sumatera juga berlaku cara seperti ini. Bahkan di Sumatera barat jauh sebelum pengumuman resmi *Giyugun* dikeluarkan, para pejabat militer Jepang

²⁶ Nugroho Notosusanto. 1979. *Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Pola Kebijaksanaan Jepang antara lain adalah menuju sasaran sumber strategis di Indonesia yaitu penguasaan sumber-sumber minyak dan karet.

²⁷ Aiko Korushawa. 1988. "Mobilization and Training of Youth in Sumatera, during the Japanese Occupation 1943-1945". (paper yang di tulis untuk sebuah tugas di Cornell University), dalam arsip nasional RI, 1988.

yang mengurus pemerintahan untuk masing-masing Shu, telah mengadakan pembicaraan dengan para pemimpin Agama setempat.

Para pemimpin agama yang berpengaruh dan para tokoh Nasionalis mulai memprogandakan tujuan pembentukan tentara suka rela dalam berbagai dakwah dan tempat umum²⁸. Sentimen-sentimen agama seperti perang Jihad menjadi alat propaganda yang paling ampuh untuk mempengaruhi para pemuda di Sumatera. Di Sumatera Barat misalnya, Ulama Shekh Jamil Jambek dan seorang tokoh Nasionalis Khatib Sulaiman adalah dua orang tokoh progaganda Giyugun yang terkenal.

Bagi Jepang penggemblengan pemuda secara militer dengan memakai semangat Nippon Seisin merupakan suatu proses untuk menjepang-kan pemuda Indonesia, akan tetapi dalam banyak hal tidak banyak yang diharapkan Jepang dalam proyek semacam ini. Semangat membela tanah air yang ditanamkan Jepang justru memperkuat perasaan Nasionalisme di kalangan pemuda. Maka pada tanggal 15 Agustus 1945, setelah pemboman Hiroshima dan Nagasaki, Jepang menyerah kepada sekutu dan sekaligus awal lenyapnya kekuasaan militer Jepang di daerah pendudukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, sewaktu perang kemerdekaan Indonesia meletus, maka para Seinendan, Heiho, Keibodan, dan Giyugun inilah yang berbalik menyerang Jepang dan Sekutu. Sebagian besar mereka pada

tanggal 15 Oktober 1945 memasuki Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Sebagian besar di antara mereka memperoleh tempat tertentu dalam hierarki kemiliteran pada masa revolusi kemerdekaan. Di antara perwira Giyugun yang memegang jabatan komando dan resimen pada masa revolusi adalah Sjarief Usman, Dahlan Ibrahim, dan Ismail Lengah. Semuanya dari Giyugun Padang. Sedangkan Hasan Basri dan Abdul Halim dari Giyugun Bukittinggi²⁹.

Pada umumnya orang-orang Jepang yang pertama sampai ke Sumatera Barat adalah para militer yang tidak berpengalaman di lapangan pemerintahan sipil seperti Belanda sebagai pendahulunya. Oleh karena itu pemerintahan Jepang lebih bercorak militer, tidak seperti pemerintahan Hindia Belanda yang bercorak pemerintahan sipil. Karena dalam keadaan perang, maka orang-orang Jepang yang datang pertama ke Sumatera Barat adalah orang-orang militer yang tidak mempunyai ilmu dan pengalaman di lapangan pemerintahan sipil. Sekalipun tenaga ahli pemerintahan yang didatangkan kemudian tidak pernah sampai ke Indonesia, karena kapalnya ditenggelamkan oleh terpedo sekutu³⁰.

Oleh karena itu pada awal kekuasaannya Pendudukan Jepang di Sumatera Barat terpaksa mempergunakan orang-orang Sumatera Barat

²⁸ Akira Oki. 1977. *Social Change in The West Sumatera, 1908-1945*, (disertasi Doktor di ANU, Camberra.

²⁹ Giyugun angkatan pertama adalah Giyugun Padang, sebelum Giyugun Bukittinggi dibuka, Giyugun Padang sudah melantik Perwira antara lain; Mohammad Dahlan Jambek, Ismael Lengah, Syarif Usman dan Abdul Muthalib (Laporan Hasan Basri tgl, 23 Juli 1986).

³⁰ Akira Oki, 1977. *Op cit*.

yang sebelumnya telah duduk juga dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda, dengan syarat tidak melanggar otoritas Jepang. Jadi, terpaksa struktur pemerintahan Jepang mengiktui struktur pemerintahan Hindia Belanda. Hanya saja semua nama-nama diganti dengan bahasa Jepang, dan seluruh posisi penting dalam pemerintahan dipegang oleh orang-orang Jepang³¹.

Sebagai pemimpin di Sumatera Barat, Kenzo Kano sampai di Padang tanggal 9 Agustus 1942 bersama dengan 68 orang pegawai sipil lainnya. Sumatera Barat yang bernama *Sumatera West Kust* diganti dengan nama *Sumatera Neishi Kaigun Shu. Afdeeling* yang dikepalai oleh Asisten Residen diganti dengan nama *Bun*, yang dikepalai oleh *Bun Shu Cho. Onder Afdeeling* yang dikepalai oleh kontroler dirubah menjadi *Baku Bun Cho*. Distrik yang dikepalai oleh demang dirubah menjadi Gun dan dikepalai oleh *Gun Cho. Onder District* yang dikepalai oleh Asisten Demang diganti dengan nama *Fuko Gun* (Kecamatan) yang dikepalai oleh *Fuko Gun Cho* unit pemerintahan yang terkecil yaitu Negara tetap dikepalai oleh seorang kepala nagari³².

Disamping lembaga Administrasi pemerintahan terdapat lagi beberapa lembaga administrasi yang bergerak dibidang lainnya. Diantara koperasi bentuk baru *Kumiai* dan *Rukun tetangga Tonariguni*. Pada tanggal 1 Oktober 1942 Yano mendirikan majelis Kerukunan Minangkabau yang bertujuan bagi Jepang untuk memperoleh informasi

sebanyak-banyaknya bagi wilayah tersebut. Anggotanya kadang-kadang terdiri dai 10 sampai 20 orang, yang diwakili dari setiap distrik, subdistrik, kepala nagari, kepala adat, para ulama, pemuda dan kaum terpelajar³³.

V. ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN DAMPAK KEDATANGAN JEPANG DI MINANGKABAU

Pendudukan Jepang (1942-1945) sering disebut sebagai garis pemisah dalam sejarah Indonesia modern. Politik pemerintahan Jepang pada tahun-tahun ini dianggap penting dalam memecahkan hubungan sosial tradisional pada tingkat lokal, serta menyiapkan tradisi bagi terciptanya latar belakang revolusi nasional dan sosial tahun 1945-1949. Di masa pendudukan Jepang organisasi-organisasi pedesaan secara langsung dihubungkan dengan dunia luar dalam pengertian politik, ekonomi, dan spiritual. Dalam hal ini diperkenalkan lembaga-lembaga sosial yang baru kepada masyarakat desa atau setidaknya bagaimana Jepang dapat memanfaatkan lembaga-lembaga sosial politik yang telah ada bagi kepentingan politik Asia Timur Rayanya.

Sebagaimana halnya pemerintahan Hindia Belanda, orang-orang juga menyandarkan terhadap orang-orang setempat yang berpengaruh dalam kelembagaan tradisional lokal, seperti: Raja di Sumatera Timur, penghulu atau ninik mamak di Minangkabau. *Uleebelang* di Aceh dan kelompok-kelompok serupa

³¹Mardjani Martamin. 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional di Sumatera Barat*. Jakarta: Depdikbud.1977/1978.

³²Ibid

³³Kita Sumatera Simbun, 23 September, 18 dan 11 November 1943, dalam Akira Oki. 1977. *Op cit*.

lainnya di daerah-daerah³⁴. Oleh karena itu tidak sedikit dampak dan reaksi yang timbul dari perlakuan Jepang terhadap masyarakat, baik dalam bentuk positif maupun negatif.

Di Minangkabau, pemerintahan telah bekerjasama dengan golongan adat, ulama dan kaum terpelajar. Pada lembaga adat dicoba mendirikan suatu lembaga yang bernama "Balai Penyelidikan Masyarakat Minangkabau" pada tahun 1943 dengan anggota terdiri dari ±56 orang dengan penguasa-penguasa adat dari berbagai daerah agar dapat mempelajari seluk beluk adat bagi kepentingan pemerintahan administrasi Jepang. Begitu juga memberi kesempatan bagi golongan terpelajar khususnya para pemuda memasuki pendidikan di bidang militer seperti Muhammad Syafe'i dan Khatib Sulaiman. Di sisi lain, Jepang juga memberikan kebebasan terhadap umat Islam untuk memperingati hari-hari besarnya, puasa pada bulan Ramadhan dan sebagainya, walaupun pada awalnya agak dibatasi.

Di pihak lain, seperti halnya dalam kelompok adat, Jepang juga berusaha mengumpulkan para ulama, yang terlihat dengan diadakannya konferensi Islam I di Singapura pada tanggal 5 sampai 6 Maret 1943. Sumatera mengirim 44 orang wakil, sementara Malaya mengirim 47 orang wakil. Arah dan konferensi tersebut adalah: 1) Menjelaskan gambaran tentang dunia Jepang; 2) Menjadikan orang Islam supaya memahami pentingnya bekerjasama dengan

Jepang; 3) Meyakinkan bahwa perkumpulan tersebut semata-mata untuk kepentingan umat Islam.

Dalam konferensi tersebut seolah-olah Jepang sangat memberikan perhatian kepada golongan Islam dan bagaimana hendaknya dengan bekerjasama dengan pihak Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil pidato yang dilontarkan Marquisto Tokugawa dalam konferensi tersebut, "Allah telah menciptakan 13 juta orang muslim untuk bekerjasama dengan Jepang. Orang-orang Islam baik hidup maupun matinya adalah bersama Jepang demi membangun Asia Baru dan orang-orang Islam hendaklah menerima uluran tangan yang demikian. Hendaklah disampaikan kepada penduduk yang beragama Islam oleh para tokoh Agama. Oleh karena itu setelah konferensi di Singapura, maka pada bulan September 1943 dibentuklah Majelis Islam Tinggi Minangkabau, yang anggotanya terdiri dari para ulama Sumatera Barat. Kemudian atas gagasan Yano lembaga ini digabung ke dalam Lembaga Studi Adat yang bernaung di bawah satu wadah Kebudayaan Minangkabau.

Di sisi lain Jepang berusaha pula menghimpun para kaum terpelajar dan pemuda untuk dilatih jadi Giyugun dan tentara sukarela, lewat inisiatif dari para penghulu kaum. Dalam awal oktober 1943 para penghulu membuka kantor Barisan Sukarela di Padang atau kantor Giyugun yang pertama di Sumatera Barat. Pada waktu yang bersamaan para ulama yang di Bukittinggi juga mendirikan kelompok-kelompok yang

³⁴M.C. Ricklefs. 1982. *A History of Modern Indonesia*. London and Basingstoke: The Macmilland Press.

sama³⁵. Dorongan yang besar bagi perkembangan Giyugun diberikan oleh Yano dalam suatu rapat besar pada tanggal 20 November 1943 di Bukittinggi. Terakhir ia mampu mempengaruhi para penghulu, yang setidak-tidaknya telah dapat merekrut 20.000 prajurit dari setiap anggota keturunannya. Seruan penghulu ini mendapat sambutan yang baik dari kelompok kaumnya. Propaganda Jepang semakin intensif dalam tahun 1944. Berbagai macam kelompok yang ada disatukan dalam Hokokai, yang dipimpin oleh Muhammad Syafe'i dan Khatib Sulaiman dari golongan gerakan Nasionalis atau terpelajar. Datuk parpatih Baringek dan Datu Majo Uang dari kelompok adat dan Sech Djamil Djambek dan Sutan Mansur dari kelompok agama. Sedangkan Muhammad Syafe'i merupakan figur sentral dari keseluruhan kelompok gabungan ini. Disamping itu para kepala kampung diberikan latihan militer yang intensif dengan menanamkan semangat Asia Timur Raya.

Bila dihubungkan dengan pola kepemimpinan tradisional yang dikemukakan pada bagian terdahulu, jelaslah bahwa pemerintahan Jepang berusaha untuk memanfaatkan ketiga saluran tersebut, seperti halnya pemerintahan Hindia Belanda dalam kepentingan politik daerah jajahan mereka.

Sekalipun Jepang, secara ideal telah berusaha membentuk berbagai organisasi kemasyarakatan dan melatih para pemuda dalam pendidikan militer dengan dalih demi kepentingan Asia bersama, namun

dalam kenyataannya semua praktek-praktek yang dilakukan Jepang tidak kurang pahitnya dari apa yang pernah dilaksanakan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Ternyata lembaga-lembaga tradisional yang ada telah merupakan saluran-saluran yang digunakan dan dimanfaatkan Jepang untuk kepentingannya. Dari beberapa hasil informasi, baik lewat wawancara maupun studi arsip, dapat disimpulkan bahwa penderitaan rakyat sungguh sangat luar biasa selama masa pendudukan Jepang.

Ada beberapa hal yang dapat dikemukakan pada bagian ini yang sehubungan dengan keganasan-keganasan Jepang terhadap wilayah taklukannya, khususnya di Sumatera Barat. Lewat saluran-saluran tradisional, seperti para penghulu, kepala-kepala kampung/desa, Jepang berusaha merekrut para tenaga-tenaga kerja paksa untuk pembuatan-pembuatan jalan raya, jalan kereta api, dan jembatan-jembatan. Praktek-praktek demikian yang dikenal dengan *Romusha*. Kemudian ada satu hal yang sangat erat kaitannya dengan politik ekonomi Jepang, yaitu penyerahan padi dan hasil-hasil panen lainnya secara paksa, sehingga kehidupan di pedesaan sangat dipengaruhi oleh politik beras selama pendudukan Jepang.

Penumpukan-penumpukan hasil panen melalui pimpinan tradisional, sementara rakyat *diracuni* dengan kemiskinan dan kelaparan akibat hasil panen yang tidak dapat mereka nikmati. Di antara dokumen-dokumen yang ditemukan di dalam arsip, terdapat laporan yang berisikan masalah-masalah yang diakibatkan oleh pungutan padi dan situasi umum yang sehubungan dengan kesejah-

³⁵ Kita Sumatera Simbun, 28 Oktober 1945, dalam Akira Oki. 1977. *Op cit.*

teraan sosial di pedesaan. Di samping itu, kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh para pejabat militer Jepang terutama terhadap kaum perempuan. Tidak sedikitnya para perempuan atau gadis-gadis desa yang menjadi korban tentara Jepang. Gadis-gadis di pedesaan direkrut untuk dijadikan wanita-wanita penghibur terutama di kamp-kamp atau markas-markas tentara Jepang³⁶. Dari beberapa hasil wawancara, para orang tua terpaksa mengawinkan anak gadisnya pada usia yang sangat muda (11-15 tahun) dan diperhentikan dari sekolah bila ada yang masih bersekolah, karena takut selalu akan digoda oleh tentara Jepang. Di sisi lain pemerintahan militer juga membanjiri Indonesia dengan sejumlah mata uang. Akibatnya pada masa selama pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya Sumatera Barat mengalami penderitaan yang luar biasa, inflasi, kekerasan, pencatutan, korupsi, pasar gelap dan tingkat kematian yang paling tinggi.

VI. PENUTUP

Sesuai dengan pokok persoalan yang dibicarakan oleh tulisan ini dapat diambil suatu konklusi sebagai berikut.

Pertama: Pada masa sebelum masuknya pengaruh Islam, kepemimpinan tradisional dapat dikatakan identik dengan kepemimpinan penghulu yang berakar dari datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Katumang-gungan. Namun, setelah masuknya

pengaruh Islam dan pengaruh Barat, konsep ideal kepemimpinan tradisional Minang-kabau mulai bergeser menjadi Tungku Tigo Sajaringan yang terdiri dari; kepemimpinan Alim Ulama, Cerdik Pandai, dan Penghulu. Sampai pada masa Jepang bahkan sampai saat ini, masyarakat Minangkabau masih tetap mengakui keberadaan pola kepemimpinan Tungku Tigo Sajaringan.

Kedua: Pada masa pemerintahan pendudukan Jepang, Jepang berusaha menggunakan ke tiga saluran ini untuk kepentingannya di wilayah pendudukannya, seperti; mensponsori dan mendirikan berbagai corak organisasi yang bernafaskan Islam dengan memanfaatkan para tokoh dan pemuka agama Islam, mengumpulkan para pemuda untuk dilatih menjadi tentara sukarela lewat parapenghulu di daerah-daerah, dan memanfaatkan para cendekiawan untuk melakukan dan meyakinkan propaganda-propaganda Jepang.

³⁶ Tempo No. 21 Tahun XXIII. 1992. "Yang jatuh di kaki Tentara Jepang" edisi 25 Juli 1992.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.A Navis. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Press.
- Ahmad Dt. Batuah A. Dt. Madjoindo. Tanpa Tahun. *Tambo Alam Minangkabau*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aiko Korushawa. 1988. "Mobilization and Training of Youth in Sumatera, during the Japanese Occupation 1943-1945". (paper yang di tulis untuk sebuah tugas di Cornell University), dalam arsip nasional RI, 1988.
- Akira Oki. 1977. *Social Change in The West Sumatera, 1908-1945*, (disertasi Doktor di ANU, Camberra.
- April Carter. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Arsip nasional Republik Indonesia, *di bawah pendudukan Jepang: kenangan Empat puluh dua orang yang mengalaminya*, penerbit Sejarah Lisan No.4.1988
- Chistine Dobbin. 1975. *The Exercice of Authority in Minangkabau in Late Century*. Kuala Lumpur.
- _____. 1977. "Economic Change in Minangkabau as a Factor in the Rise Padri", dalam *Indonesia*. 1977.
- Elizabeth E. Graves. 1981. *The Minang-kabau Response to Duch Colonial. Rule in the Ninetcenth Century*. New York: Ithaca: Cornell University Press.
- Herman Sihombing. 1983. "Hukum Adat Minangkabau mengenai Tungku Tigo Sajaringan dan Tali Tigo Sapilin" dalam A.A. Navis (Ed). 1983. *Dialektika Minangkabau dalam Kemelut Sosial*. Padang:Genta Singgalang Press.
- Koentjaraningrat. 1986. "Kepemimpinan dan Kekuasaan Tradisional, Masa Kini, resmi dan Tak Resmi" dalam Miriam Budiarjo. *Aneka Penulisan tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- L.C. Westenenk. 1918. *De Minangkabau Sche Nagari* Edisi ke-3. Welstervreder.
- M.C. Ricklefs. 1982. *A History of Modern Indonesia*. London and Basingktoke: The Macmilland Press.
- Mardjani Martamin. 1978. *Sejarah Kebangkitan Nasional di Sumatera Barat*. Jakarta: Depdikbud.1977/1978.
- Max Weber. 1947. *The Theory of Social and Economic Organization* (translated by A.M Henderson and Talcott Parsons). New York: Oxford University Press.
- Mochtar Naim. 1984. *Merantau Pola Migrasi Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah-mada University Press.
- Nugroho Notosusanto. 1979. *Tentara Peta pada Zaman Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Gramedia. Pola Kebijakan Jepang antara lain adalah menuju sasaran sumber strategis di Indonesia yaitu penguasaan sumber-sumber minyak dan karet.

- P.E. de Josselin de Jong. 1980. *Minangkabau and Negeri Sembilan: Sosio Political Structure in Indonesia*. Den Haag: Martinus Nijhoff Iletgeverij.
- Sartono Kartodirdjo. 1984. *Ratu Adil* Jakarta: Sinar Harapan.
- Schrieke. 1973. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat: Sebuah Sumbangan Bibliografi* (terjemahan oleh: Soergata Poerbakawatja. Jakarta: Bharata.
- Taufik Abdullah. 1966. "Adat and Islam An examination of conflict in Minangkabau" dalam *Indonesia*, No. 2 Oktober 1966.
- _____. 1972. *Modernization in the Minangkabau World; West Sumatera In Early of the twentienth Century*. London, Ithaca, London: Cornel University Press.
- _____. 1972. *Schools and Politics: The Kaum Muda Moyement in West Sumatera*. New York: Ithaca Cornell University Press.
- Tempo No. 21 Tahun XXIII. 1992. "Yang jatuh di kaki Tentara Jepang" edisi 25 Juli 1992.